



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

Jl. Arif Rahman Hakim No.10 Jambi 36124

Telepon : 0741
Facsimile : 0741
Kotak pos : 148
Kawat : Kehd

Jambi, 30 April 2020

Nomor : 1547 /Dishut-1.2/IV/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Keuangan Dinas Kehutanan
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Jambi
Di-
Jambi

Memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan keuangan APBD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS,



AKHMAD BESTARI. SH. MH

Pembina Tk.I

NIP. 19740509 199903 1 004



**LAPORAN REALISASI KEUANGAN (LRA),
NERACA, LAPORAN OPERASIONAL,
LAPORAN EQUITAS, DAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (CALK)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAMBI**

Jl. Arif Rahman Hakim No. 10
Telanaipura Jambi

KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 UnAudited Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jambi, Januari 2020

KEPALA DINAS
AKHMAD BESTARI, SH, MH
PEMBINA Tk. I / IV.b
NIP.19740509 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	III
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	26



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KEHUTANAN

Telepon : 0741 -622
Facsimile : 0741 -615
Kotak pos : 148
Kawat : Kehda Jbi

Jl. Arif Rahman Hakim No.10 Jambi 36124

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 UnAudited Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 Unaudited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Januari 2020

KEPALA DINAS,



AKHMAD BESTARI, SH, MH

PEMBINA TH. 1 / IV. b

NIP. 19740509 199903 1 004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2019 UnAudited Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2019 adalah berupa Retribusi Taman Hutan Kenali sebesar Rp.100.287.00,-

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp.72.033.454.545,65,- atau mencapai 86,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.83.672.632.077,66

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.25.235.753.621,99 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 251.672.000,-, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.24.110.581.621,99; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.873.500.000,-. Nilai Kewajiban berupa Utang Jasa Kantor sebesar Rp.13.260.410 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp.25.222.493.211,99

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.100.287.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp.21.043.368.673,56 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.68.383.315.215,17 ditambah dengan koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap senilai Rp.605.626.900,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.25.215.140.206,39.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN				
Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 120.000.000,00	Rp 100.287.000,00	83,57	Rp 110.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 120.000.000,00	Rp 100.287.000,00	83,57	Rp 110.200.000,00
BELANJA	Rp 83.672.632.077,66	Rp 72.045.851.948,00	86,10	Rp 58.804.450.461,00
Belanja Operasi	Rp 78.270.349.985,66	Rp 67.091.848.068,00	85,72	Rp 55.802.078.111,00
Belanja Pegawai	Rp 60.697.529.327,66	Rp 50.707.067.450,00	83,54	Rp 46.116.155.596,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.572.820.658,00	Rp 16.384.780.618,00	93,24	Rp 9.685.922.515,00
Belanja modal	Rp 5.402.282.092,00	Rp 4.954.003.880,00	91,70	Rp 3.002.372.350,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.896.000.000,00	Rp 1.754.178.000,00	92,52	Rp 701.545.350,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 3.506.282.092,00	Rp 3.199.825.880,00	91,26	Rp 2.300.827.000,00
Surplus / (Defisi)	Rp (83.552.632.077,66)	Rp (71.945.564.948,00)	86,11	Rp (58.694.250.461,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp (83.552.632.077,66)	Rp (71.945.564.948,00)	86,11	Rp (58.694.250.461,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018 (DalamRupiah)

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp -	Rp -
Piutang Bukan Pajak	Rp -	Rp -
Bagian Lancar TP/TGR	Rp -	Rp -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp -	Rp -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang bukan pajak	Rp -	Rp -
Belanja Dibayar di Muka	Rp -	Rp -
Pendapatan yang Masih harus Diterima	Rp -	Rp -
Persediaan	Rp 251.672.000,00	Rp 252.480.050,00
Persediaan yang belum di register	-	-
Jumlah Aset Lancar	Rp 251.672.000,00	Rp 252.480.050,00
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan TP/TGR	Rp -	Rp -
Tagihan Penjualan Angsuran	Rp -	Rp -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	Rp -	Rp -
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	Rp 1.022.663.192,00	Rp 1.022.663.192,00
Peralatan dan Mesin	Rp 26.138.362.314,87	Rp 23.957.496.244,87
Gedung dan Bangunan	Rp 13.975.118.818,00	Rp 9.887.286.938,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 6.979.329.270,00	Rp 6.924.781.850,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 222.142.963,00	Rp 222.142.963,00
Konstruksi dalam pengerjaan	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp (24.227.034.935,88)	Rp (21.550.715.815,31)
Jumlah Aset Tetap	Rp 24.110.581.621,99	Rp 20.463.655.372,56
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	Rp 35.500.000,00	Rp 35.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -
Aset Lain-Lain	Rp 838.000.000,00	Rp 299.600.000,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Lainnya	Rp 873.500.000,00	Rp 335.100.000,00
JUMLAH ASET	Rp 25.235.753.621,99	Rp 21.051.235.422,56
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	Rp -
Utang bunga	Rp -	Rp -
Pendapatan Diterima di Muka	Rp -	Rp -
Utang Belanja Jasa Kantor	Rp 13.260.410,00	Rp 7.866.749,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 13.260.410,00	Rp 7.866.749,00
JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 13.260.410,00	Rp 7.866.749,00
EKUITAS		
Ekuitas	Rp 25.222.493.211,99	Rp 21.043.368.673,56
JUMLAH EKUITAS	Rp 25.222.493.211,99	Rp 21.043.368.673,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 25.235.753.621,99	Rp 21.051.235.422,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan
31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 100.287.000,00	Rp 110.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 100.287.000,00	Rp 110.000,00
BEBAN		
Beban Pegawai	Rp 50.710.962.350,00	Rp 46.128.000,00
Beban Persediaan		
Beban Barang dan Jasa	Rp 16.382.641.019,00	Rp 9.598.000,00
Beban Pemeliharaan		
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Beban Bantuan Sosial		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 1.389.998.846,17	Rp 9.643.000,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
JUMLAH BEBAN	Rp 68.483.602.215,17	Rp 65.370.000,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	Rp (68.383.315.215,17)	Rp (65.260.000,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		
Defisit Selisih Kurs		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -
POS LUAR BIASA		
Pendapatan PNB		
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Persediaan		
SURPLUS/DEFISIT LO	Rp 136.766.630.430,34	Rp 130.520.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan
31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	21.043.368.673,56	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(68.383.315.215,17)	(65.260.113.354,59)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	605.626.900,00	-
Koreksi Ekuitas Penikaian Pencatatan Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	-	-
Koreksi Lain-lain	-	-
JUMLAH		-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	71.949.459.848,00	58.694.250.461,00
EKUITAS AKHIR	25.215.140.206,00	(6.565.862.893,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 termasuk dalam misi 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik melalui Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Misi 2. Menjaga situasi daerah yang Kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat melalui Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Misi.3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tercantum dalam Misi Provinsi Jambi yakni menuju Jambi TUNTAS 2021 melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Entitas berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No.10 Telanai Pura Jambi.

Implentasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan Perangkat Daerah yang membawahi UPTD Tahura dan UPTD KPHP.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tidak terlepas dari Neraca Pembangunan Provinsi Jambi. Dimana penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Laporan Keuangan ini

keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban

mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

berikut:

- Pendapatan Retribusi Daerah
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BAKELUDA Prov Jambi.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	10%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau kurang dari

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.100.287.000 atau mencapai 83,57 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000.000. Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terdiri dari Retribusi Taman Hutan Kenali. Tidak tercapainya penerimaan Daerah dari Retribusi Taman Hutan Kenali menurunnya pengunjung perorangan dampak dari Kabut asap yang terjadi di provinsi Jambi dalam jangka waktu relatif lama

belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	60.697.529.328	50.707.067.450	83,54
Belanja Barang dan Jasa	17.572.820.658	16.384.330.618	93,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.896.000.000	1.754.178.000	92,52
Belanja Modal Gedung dan Bangun	3.506.282.092	3.187.878.478	90,92
Total Belanja Kotor	83.672.632.078	72.033.454.546	86,09
Jumlah	83.672.632.078	72.033.454.546	86,09

B.3 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebesar Rp.16.384.330.618 atau 91,16 % dari anggaran sebesar Rp.17.572.820.658 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Alat Tulis Kantor	424.979.300	413.461.500	97,29
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	38.476.210	37.444.420	97,32
Belanja Perang, Materai dan Benda Pos Lainnya	34.130.000	33.408.000	97,88
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.886.666	28.861.759	99,91
Belanja Bahan Bakar Minyak/gas	22.450.000	16.557.500	73,75
Belanja Cenderamata/souvenir, vandle, piala dan penghargaan lainnya	17.750.000	17.750.000	100,00
Biaya Dokumentasi	29.500.000	21.088.000	71,48
Biaya Dekorasi	134.850.000	106.340.000	78,86
Biaya Publikasi	19.150.000	15.630.000	81,62
Belanja alat rumah tangga pakai habis	10.000.000	10.000.000	100,00

Belanja Bahan Kimia dan pupuk	119.325.000	110.822.000	92,87
Belanja bahan praktek dan percontohan	48.347.000	35.450.000	73,32
Biaya Seminar Kit	32.675.000	32.675.000	100,00
Belanja Telepon	10.000.000	4.125.745	41,26
Belanja Air	15.000.000	14.971.025	99,81
Belanja Listrik	270.000.000	269.962.923	99,99
Belanja Surat Kabar / Majalah	17.240.000	13.604.000	78,91
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	100.000.000	87.545.498	87,55
Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000	1.584.000	79,20
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber	347.650.000	347.000.000	99,81
Belanja Jasa Kebersihan Kantor	190.000.000	190.000.000	100,00
Belanja Jasa Upah/Ongkos Tenaga Kerja Bulanan	20.250.000	11.850.000	58,52
Belanja Jasa Upah/Ongkos Tenaga Kerja Harian	939.010.222	594.146.300	63,27
Belanja Jasa Transfer Liputan	155.000.000	155.000.000	100,00
Belanja Transportasi	347.000.000	343.014.000	98,85
Belanja Akomodasi dan Konsumsi	182.150.000	179.750.000	98,68
Belanja Jasa Service	105.000.000	97.812.536	93,15
Belanja Penggantian Suku Cadang	204.000.000	189.565.222	92,92
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	411.080.000	373.811.368	90,93
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000	27.525.300	91,75
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.500.000	5.971.900	38,53
Belanja Cetak	197.446.000	158.417.400	80,23
Belanja Penggandaan	184.107.000	157.768.600	85,69
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pega	1.430.000	1.430.000	100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	276.449.725	211.403.500	76,47
Belanja Makanan dan minuman Tamu	4.000.000	450.000	11,25
Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan	111.530.000	109.545.000	98,22
Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH	28.000.000	28.000.000	100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Sosialisasi	110.917.500	107.122.000	96,58
Belanja Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	56.653.900	51.642.500	91,15
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	289.800.000	277.800.000	95,86
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	87.475.000	87.475.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.557.433.172	5.448.758.306	98,04
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.370.986.697	2.280.785.241	96,20
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	58.150.000	37.635.000	64,72
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	255.000.000	254.780.000	99,91
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.480.250.266	1.396.529.000	94,34
Belanja kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000	-	-
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	422.895.000	383.563.000	90,70
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.732.000	11.232.000	88,22
Honorarium Operator LPPK dan TEPPA	12.000.000	12.000.000	100,00
Honorarium Penatausahaan Keuangan	316.815.000	307.816.000	97,16

Total Belanja Kotor	17.572.820.658	16.384.330.618	93,2
Pengembalian	(82.091.750)		-
Jumlah	17.654.912.408	16.384.330.618	92,8

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 adalah sebesar Rp.4.954.003.880. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2019 adalah Rp.1.754.178.000.

B.5.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan TA 2019 adalah Rp.3.199.825.880.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 31 Desember 2018

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Uang Tunai		

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya Pendapatan Retribusi Daerah terdapat anggaran estisasi penerimaan sebesar Rp.120.000.000,yang terealisasi sebesar Rp.100.287.000.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018

Keterangan	TH 2019	TH 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah		

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2019 dan 2018

Uraian	TH 2019	TH 2018
Piutang PNB	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.(12.300). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.251.672.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persediaan TA Desember 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019
Alat Tulis Kantor	180.015.800

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Alat Tulis Kantor Rp.180.015.800 (rincian terlampir)
2. Bahan Kebersihan Rp. 1.622.200 (rincian terlampir)
3. Bahan Kimia Rp.11.000.000 (rincian terlampir)
4. pupuk Rp.15.000.000 (rincian terlampir)
5. Alat listrik Rp.24.034.000
6. Aset yang akan diserahkan ke pihak ketiga berupa bibit yang diserahkan kemasyarakat Rp.20.000.000

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jang

masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tertagih- Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.022.663.192.

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah Rp.26.138.362.314,87. Peralatan dan mesin dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.13.975.118.818 Gedung dan bangunan dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.6.979.329.270 Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap berupa Aset tetap lainnya yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.222.142.963 Aset tetap lainnya dicatat pada Buku Invesntaris Barang tersendiri.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tidak mempunyai Kontruksi dalam Peengerjaan.

C.21 Aset Tak Berwujud

Pada Dinas Kehutanan tidak mempunyai aset tak berwujud sehingga tidak terdapat Saldo Aset tak berwujud per Desember 2019.

C.22 Aset Lain-Lain

Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp.838.000.000.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.757.410 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang dananya tidak mencukupi pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.25.932.058.570 dan Rp.18.803.783.261 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.100.287.000

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 sebesar Rp.50.710.962.350. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2019 adalah sebesar Rp.16.382.641.019

D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.389.998.846,17

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.21.043.368.763,56

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.(68.383.315.215,17). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit

E.3.1. Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.605.626.900 koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.



PENGGUNA ANGGARAN

AKHMAD BESTARI. SH. MH

Pembina Tk II

NIP.19740508 199903 1 004